



**“PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI ATAS
PERMOHONAN ACTIO PAULIANA KURATOR TERKAIT SITA
PIDANA HARTA PAILIT DALAM SITA UMUM KEPAILITAN”**

TESIS

HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM

1810622100

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2020**



**“PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI ATAS
PERMOHONAN ACTIO PAULIANA KURATOR TERKAIT SITA
PIDANA HARTA PAILIT DALAM SITA UMUM KEPAILITAN”**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM

1810622100

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hasbullah Alimuddin Hakim

NRP : 181022100

Tanggal : 18 Januari 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Januari 2021

Yang Menyatakan



Hasbullah Alimuddin Hakim

(Hasbullah Alimuddin Hakim)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai Civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasbullah Alimuddin Hakim

NRP : 181022100

Program Studi : Magister Hukum

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non –exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI ATAS PERMOHONAN ACTIO PAULIANA KURATOR TERKAIT SITA PIDANA HARTA PAILIT DALAM SITA UMUM KEPAILITAN”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Januari 2021

Yang Menyatakan



(Hasbullah Alimuddin Hakim)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Hasbullah Alimuddin Hakim

NRP : 181022100

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : "PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI ATAS

PERMOHONAN ACTIO PAULIANA KURATOR TERKAIT
SITA PIDANA HARTA PAILIT DALAM SITA UMUM
KEPAILITAN"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H)** pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Ketua Penguji



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Penguji 1



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.

Penguji 2/ Pembimbing



Dr. H. Abdurrahman Halim, M.Ag.

Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Kepala Program Studi

Ditetapkan di
Tanggal Ujian

Jakarta
: 21 Januari 2021



ABSTRAK

Dalam prakteknya, Kurator banyak menghadapi permasalahan dalam pemberesan harta pailit seperti halnya terdapat Sita Pidana oleh Penyidik terhadap harta pailit meskipun Pasal 31 UUK-PKPU mengatur dengan tegas segala penetapan sita atas harta kekayaan debitor menjadi hapus sejak putusan pailit diucapkan dan hanya berlaku sita umum kepailitan, sehingga dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit, Kurator dituntut untuk membatalkan setiap tindakan sita pidana selain sita umum melalui permohonan *Actio Pauliana*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai tugas dan wewenang kurator terkait adanya sita pidana terhadap harta pailit dalam pemberesan kepailitan serta Persesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan PK No. 202 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan UUK-PKPU dan KUHAP dalam memutus Permohonan *Actio Pauliana* Kurator atas tindakan Sita Pidana terhadap harta pailit. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder yang mengkaji permasalahan berdasarkan UUK-PKPU, KUHPerdara, KUHAP serta didukung studi putusan Mahkamah Agung. Hasil dari penelitian ini telah diketahui bahwa *pertama*, Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UUK-PKPU secara tegas memberikan kewenangan kepada Kurator untuk mengajukan Permohonan *Actio Pauliana* kepada Pengadilan Niaga terkait pembatalan sita pidana Penyidik terhadap harta pailit dibawah sita umum kepailitan. *Kedua*, Pertimbangan Hakim Putusan PK No. 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang mengabulkan dan menerima Permohonan *Actio Pauliana* Tim Kurator terkait pembatalan Sita Pidana telah sesuai dengan Pasal 3 Jo. Pasal 41 UUK-PKPU, Sedangkan Pertimbangan Hakim Putusan No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menolak Permohonan *Actio Pauliana* Tim Kurator dengan alasan harus melalui Praperadilan tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan KUHAP karena sesuai Pasal 9 Jo. Paasl 81 Jo. Pasal 95 ayat (2) Tim Kurator tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Praperadilan. Seharusnya majelis hakim lebih cermat menerapkan kepastian hukum dalam memutus Permohonan *Actio Pauliana* Tim Kurator terkait pembatalan Sita Pidana terhadap Harta Pailit berdasarkan UUK-PKPU dan KUHAP.

Kata Kunci : Kurator, *Actio Pauliana*, Sita Pidana, Sita Umum Kepailitan.

ABSTRAK

In practice, Curators face many problems in resolving bankruptcy assets such as Criminal Confiscation by Investigators for bankruptcy assets even though Article 31 of UUK-PKPU strictly regulates all confiscation of debtor's assets to be erased since the bankruptcy decision was pronounced and only general confiscation of bankruptcy applies, So that in order to increase the value of bankruptcy assets, the Curator is required to cancel any criminal confiscation other than general confiscation through Actio Pauliana's petition. This study aims to answer problems regarding the duties and powers of the curator related to the existence of criminal confiscation of bankruptcy assets in resolving bankruptcy and the appropriateness of the considerations of the Supreme Court in the PK Decision No.202 PK/Pdt.Sus/2012 and Decision No.156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 with UUK-PKPU and KUHAP in deciding on Actio Pauliana Curator's Petition for Criminal Confiscation of the bankruptcy estate. This thesis research uses a normative juridical research method that is descriptive analysis using secondary data that examines the problems based on the UUK-PKPU, Civil Code, Criminal Procedure Code and is supported by studies of Supreme Court decisions. The results of this research show that first, based on the provisions of Article 3 Jo. Articles 41 to Articles 49 of the UUK-PKPU expressly give authority to the Curator to submit Actio Pauliana's Application to the Commercial Court regarding the cancellation of the investigator's criminal confiscation of bankruptcy assets under general confiscation of bankruptcy. Second, the Judges' Consideration of PK No. 202 PK / Pdt.Sus / 2012 which granted and accepted Actio Pauliana's Request from the Curator Team regarding the cancellation of criminal confiscation in accordance with Article 3 Jo. Article 41 UUK-PKPU, Meanwhile Judges' based on Decision No.156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 who rejected Actio Pauliana's Request by the Curator Team on the grounds that having to go through pretrial was not in accordance with UUK-PKPU and KUHAP because it was in accordance with Article 9 Jo. Article 81 Jo. Article 95 paragraph (2) The Curator Team does not have Legal Standing to apply for Pre-trial. The panel of judges should have been more careful in applying legal certainty in deciding the Actio Pauliana Request from the Curator Team regarding the cancellation of Criminal Confiscation for Bankrupt Assets based on UUK-PKPU and KUHAP.

Keywords: Curator, Actio Pauliana, Confiscation Criminal, General Confiscation Bankruptcy.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama dan paling utama di hati ini, penulis panjatkan puji dan rasa syukur yang amat besar kepada ALLAH SWT. Berkat rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan segenap suka cita. Penyusunan Tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Negeri Jakarta dengan judul **“PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI ATAS PERMOHONAN ACTIO PAULIANA KURATOR TERKAIT SITA PIDANA HARTA PAILIT DALAM SITA UMUM KEPAILITAN”** Kelancaran proses penulisan Tesis ini berkat bimbingan, arahan, motivasi dan kerjasama yang amat besar dari berbagai pihak hingga terselesaikannya tesis ini. Selain itu, ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya oleh penulis yang disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Terima kasih atas setiap kebijakan, dukungan dan selalu berpihak pada Mahasiswa Program Studi Magister Hukum khususnya angkatan Ganji Tahun 2018.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku kepala program studi Magister Hukum, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang Berjiwa Muda dan sangat Energik, Kreatif dan Progresif dalam usahanya untuk mengembangkan sistem akademik Kegiatan Belajar Mengajar pada Program Studi Magister Hukum. Terima kasih atas waktu, kebijakan dan dukungan secara akademik selama penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu menjadi Suri Tauladan khususnya bagi Penulis dan Rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum Lainnya, karena tidak hanya memberikan bimbingan secara akademik yang meliputi pada substansi materi dan Teknis Penulisan Tesis kepada Penulis, namun Pembimbing juga sering support dan mengajak dan bercerita tentang sekolah kehidupan setelah lulus Magister Hukum yang akan menghadapi tantangan lebih berat dan menguji ilmu hukum penulis di masyarakat khususnya dalam bidang profesi dunia Advokat. Terimakasih sudah sangat baik dan maksimal memberikan saran dan masukan ilmu hukumnya yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses penulisan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Proposal Tesis dan Penguji Sidang Tesis beserta Para Dosen di Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selama ini telah bekerja keras dalam memberikan banyak ilmu

pengetahuan khususnya dibidang hukum kepada penulis untuk bekal penulis di masa depan nanti.

6. Ibu Yuli, Bapak Satino, Mas Dwi dan Para Pegawai/ Staf lainnya di Sekretariat Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik, Sabar dan Ramah dalam memberikan setiap pelayanan administrasi dan berbagai informasi seputar perkuliahan kepada para Mahasiswa Magister Hukum sehingga Penulis bisa lulus dengan Tepat waktu.
7. Miranti Dwi Pangesti, S.H., Selaku Istri dan ananda Raihan Khaizuran Shabir selaku putra pertama, orang tua, seluruh Keluarga yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril dan materiil dalam keluarga.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta khususnya Keluarga Besar Angkatan semester Tahun 2018 khususnya Bang Indra Irawan, Bang Alex Pane, Erik Raja Sianipar, Bang Ahmad Baihaki, Bang Tubagus Deni Sunardi, Bang Army Setyo Wibowo, Bang Agus, Rahman, Wahyu Dwi Erlangga, Prima C. Tambunan, Rildo, Tangkas yang tergabung dalam Grup WA “Anak Bisnis UPN”, Mba Mayang, Bunda Parura Kristy dan Rekan lainnya yang telah berjuang bersama penulis baik dalam menempuh setiap jam perkuliahan untuk mencapai gelar Magister Hukum maupun kebersamaan diluar perkuliahan kampus serta banyak memberikan dukungan-dukungan positif kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih dalam proses pembelajaran dan belum sempurna Oleh karena itu, segala kritik, saran, motivasi yang sifatnya mendidik dan membangun kearah yang lebih baik, senantiasa penulis terima dengan terbuka dan lapang dada.

Jakarta, 18 Januari 2021

Hormat Penulis



Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Pokok Permasalahan	15
I.3 Tujuan Penelitian	16
I.4 Manfaat Penelitian	16
I.5 Kerangka Teoritis	17
Kerangka Konseptual	24
I.6 Metode Penelitian	29
I.7 Sistematika Penulisan	33
BAB II TUGAS DAN WEWENANG KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI INDONESIA	
II.1. Tinjauan Umum tentang Hukum Kepailitan di Indonesia	37
1. Pengertian dan Definisi Kepailitan	37
2. Syarat dan Prosedur Permohonan Kepailitan	42
3. Akibat Hukum dan Upaya Hukum Putusan Peryataan Pailit.....	48
II.2. Tinjauan Umum tentang Tugas dan Wewenang Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	60
1. Pengertian dan Syarat Pengangkatan Seorang Kurator	60
2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Kurator.....	68
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1. Metode Penelitian	80
III.2. Tipe Penelitian	80
III.3. Sumber Data	81
III.4. Metode Pengumpulan Data	82
III.5. Metode Analisis Data	83
III.6. Jadwal Penelitian	84
BAB IV PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TERKAIT KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN ACTIO PAULIANA ATAS TINDAKAN SITA PIDANA HARTA PAILIT DALAM PUTUSAN PK NO. 202	

PK/PDT.SUS/2012 DAN PUTUSAN NOMOR 156 K/PDT. SUS-PAILIT/2015.

IV.1. Kedudukan Sita Umum Pailit dan Tindakan Penyitaan Pidana.

1. Pengertian dan Tujuan Sita Umum Harta Pailit dalam Kepailitan 86
2. Sita Umum Harta Pailit (*Lex Specialis*) 90
3. Pengertian dan Tujuan Sita Pidana dalam Hukum Pidana..... 95
4. Jenis Benda Sitaan dan Tata Cara Sita Pidana menurut KUHAP..... 97

IV.2. Analisis Pertimbangan Hakim MA RI terkait Kewenangan Kurator dalam Membatalkan Tindakan Sita Pidana Harta Pailit melalui Upaya *Actio Pauliana* berdasarkan Putusan PK No. 202 PK/PDT.Sus/2012 dan Putusan No. 156 K/Pdt. Sus-Pailit/2015.

1. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan PK No. 202 PK/PDT.SUS/2012..... 106
 - 1.1 Kasus Posisi dan Amar putusan PK No. 202PK/PDT.SUS/2012 106
 - 1.2 Analisis Kewenangan Kurator mengajukan Gugatan *Actio Pauliana* dalam membatalkan Sita Pidana Harta Pailit yang dikabulkan berdasarkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan PK No. 202 PK/PDT.SUS/2012.. 112
2. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Putusan Kasasi No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015..... 116
 - 2.1 Kasus Posisi dan Amar Putusan Kasasi No. 156 K/Pdt. Sus-Pailit/2015.. 117
 - 2.2 Analisis Kewenangan Kurator dalam Membatalkan Tindakan Sita Pidana Harta Pailit melalui Upaya *Actio Pauliana* yang tidak dapat diterima secara Kompetensi Absolut berdasarkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.. 123

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 169
- B. Saran 171

DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP